



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Kliping Digital Media Online**

Politik

Selasa, 23 November 2021



**BIRO HUMAS DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan & Kearsipan**  
Jakarta  
2021

## **Daftar Isi**

1. AUKUS, TAK MATI PELANDUK DI TENGAH - *Media Online Media Indonesia*
2. G-20, COP26 AND SDGs: TOWARD NATURE 5.0 - *Media Online The Jakarta Post*



Selasa, 23 November 2021

## AUKUS, tak Mati Pelanduk di Tengah

Darmansyah Djumala

Dosen Hubungan Internasional, FISIP Unpad,  
Dubai RI untuk Austria dan PBB 2017-2021

**K**ETIKA publik ber-gunung soal geopolitik strategis AUKUS (aliansi militer 3 negara: Australia, Inggris, dan AS), tiba-tiba sebuah pepatah klasik teringat kembali. Lengkapnya berbunyi: ketika gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengah.

Eksresi ini merujuk kepada keadaan manakala ada dua kekuatan yang kuasa bersepetu, pihak yang lemah menjadi korban. Metafora itu dikaitkan dengan kemungkinan implikasi politik AUKUS terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Terbersit kekhawatiran, AUKUS berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan Asia Pasifik, terutama di Laut China Selatan. Tak mustahil terjadi konflik terbuka. Jika itu terjadi, negara-negara yang lebih lemah di kawasan itu justru merugi. Jadi korban. Bagi pelanduk mati terjepit di tengah ketika dua gajah saling tak mau kalah. Menjadi pertanyaan, bagaimana agar pelanduk tak mati di tengah?

Para pengamat geopolitik in-

ternasional nyaris seepakat. Niat terselubung di balik pembentukan aliansi militer AUKUS untuk menghadapi kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok di Laut China Selatan. Sejak ditahbiskan oleh Bank Dunia sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS pada 2010, panda benar Tiongkok mengapitalisasi status itu untuk kepentingan ekonomi dan militer strategisnya di berbagai belahan dunia, termasuk di Laut China Selatan.

AS, sebagai kekuatan yang sudah lama bercokol di Asia Pasifik (*resident power*), tentu gusar dengan kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok (*emerging power*) ini. Seperti halnya AS tak begitu yakin, aliansi militernya dengan Jepang dan Korea Selatan cukup efektif menghadang Tiongkok. Dalam konteks rivalitas AS-Tiongkok inilah, persepsi strategis Indonesia dan ASEAN mestinya diformulasikan.

Dalam perspektif geopolitik, pembentukan AUKUS membebaskan kekhawatiran ASEAN dan Indonesia. Sebab, pertama, beberapa anggota ASEAN (Phi-

pina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei) sedang bersengketa dengan Tiongkok terhadap kepemilikan Spratly Island. Filipina dan Vietnam pernah terlibat ketegangan kecil dengan Tiongkok, di wilayah perairan tsb. Anda saja kedua belah pihak, aliansi AUKUS dan Tiongkok, miscalculasi dalam menangani potensi konflik di wilayah itu, bukan tidak mungkin ASEAN terseret dalam perebutan teritori yang mengarah pada konflik terbuka.

Kedua, bagi Indonesia sendiri, agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan risikan bersengolan dengan kepentingannya di ZEE di utara Natuna. Dengan dalih, berhak atas wilayah perairan sekitar Natuna berdasar klaim sepihak *nine-dash line*-nya, nelayan Tiongkok (dengan dikawal oleh *coast guard*) mencuri ikan diperairan ZEE Natuna. Perilaku ilegal seperti ini jika tidak ditangani dengan bijak oleh kedua belah pihak bisa menjadi impetus konflik di kawasan.

Ketiga, The Economist (25 September 2021) pernah melansir persepsi ancaman Tiongkok terhadap AUKUS. Diungkapkan, berdasar data Center for Strategic and Budgetary Assessment (CSBC), lembaga *think tank* AS, kapal selam nuklir Australia mampu melakukan patroli

sampai Samudra Hindia, Laut China Selatan, dan Okinawa (selatan Jepang). Berbeda dengan kapal selam konvensional yang hanya bisa *on station* di bawah laut selama 2 minggu, kapal selam nuklir mampu sampai 2,5-3 bulan.

Banyak hal bisa dilakukan dalam jangka waktu itu, seperti pengumpulan data intelijen dan pengeluaran pasukan khusus. Ini yang dikawatirkan Tiongkok. Pembentukan AUKUS dengan kapal selam nuklir Australia yang daya jelajahnya mampu merangsek sampai ke Laut China Selatan jelas menggodanya Tiongkok meningkatkan kemampuan militer lainnya. Pada titik ini, perlombaan senjata dan penggunaan kekuatan sangat mungkin terjadi. Salah kalkulasi, bisa dengan mudah memantik konflik terbuka. Kemungkinan situasi seperti ini yang mesti diantisipasi Indonesia dan ASEAN.

Namun, seberapa besar kemungkinan perang terbuka? Agak sulit membayangkan perang terbuka frontal antara Tiongkok dan aliansi AUKUS di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Laut China Selatan. Setidaknya dalam jangka pendek. Pengamat Australia berpandangan, pembentukan pakta militer AUKUS di Asia Pasifik, dalam perspektif geo-

politik, tak ubahnya seperti aliansi militer negara Barat untuk menghadapi Rusia di Eropa (Joe Wheatley, Fear, Honour and AUKUS in the Indo-Pacific, The Strategy Bridge, November 2021).

Secara teoretik dan praktis, stabilitas di Eropa terjamin selama ini karena ada perimbangan kekuatan di sana. Rusia tak berani macam-macam karena di sana ada aliansi militer NATO. Dalam konstruksi pemikiran seperti ini, banyak pihak melihat keberadaan AUKUS sebagai faktor pengimbang kebangkitan militer Tiongkok. Keseimbangan seperti ini yang dipercaya dapat menjaga stabilitas kawasan, sedemikian sehingga dapat menekan kemungkinan konflik terbuka.

Ada pepatah lama: *rich man does not go to war*. Maksudnya, jika orang sudah kaya, mereka tak mau berperang. Metafora ini cocok dengan keadaan Tiongkok sekarang. Tiongkok sedang menikmati kejayaan ekonominya. Perang di halaman sendiri, hanya akan menghancurkan segala kenikmatan itu. Adapun, tiga negara AUKUS kecil kemungkinan mau berkonflik langsung dengan Tiongkok secara militer. Jikapun terjadi konflik, paling hanya berupa *proxy war*, menggunakan negara ketiga.

Dalam konteks inilah, ASEAN harus bijak dalam mengambil posisi. Salah langkah, hanya akan membenamkan negara anggotanya ke dalam kenistaan *locus of proxy war*. Hanya menjadi ajang pertarungan kekuatan negara lain. Dalam konflik Laut China Selatan, boleh jadi AS dan sekutunya menggunakan tangan Vietnam dan Filipina. Sebab, Filipina terang-terangan mendekati ke AS dan mendukung AUKUS, sementara antara AS dan Vietnam sudah ada tanda-tanda *rapprochement*.

Negara lemah (secara ekonomi) di ASEAN rentan sekali untuk menjadi *locus of proxy war*. Ingat saja, bagaimana mudahnya Tiongkok menekan Kamboja untuk tidak memasukkan isu Laut China Selatan dalam Komunike Bersama Menuju ASEAN di Kamboja, Juli 2012. Ini hanya menegaskan betapa sulitnya posisi negara yang lebih lemah untuk menolok keinginan negara kuat.

Sulit benar pelanduk ambil posisi mandiri ketika gajah berkelahi. Menjadi penting: bagaimana agar pelanduk tidak terjepit mati? Pertama, ASEAN dan Indonesia harus terus mempertahankan konsep ASEAN Centrality. Artinya, Indonesia harus ambil peran melibatkan ASEAN dalam setiap forum regional yang membahas masa depan Asia Pasifik agar suara dan kepentingannya ikut dipertimbangkan. Kerja sama ekonomi

regional intra-ASEAN harus diperdalam, terutama dalam membangun konektivitas dan infrastruktur maritim.

Kedua, Indonesia harus melakukan *equal distance strategy* dalam berhubungan dengan negara-negara yang berkepentingan dengan kawasan Asia Pasifik dan Laut China Selatan. Mengundang investor dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan AS untuk mengembangkan pulau-pulau terluar bisa menekan potensi konflik ke level minimum. Menggeliatnya ekonomi pulau terluar akan meneguhkan *effective occupation* dan menegaskan kehadiran negara.

Berkembangnya ekonomi Natuna berkat investasi berjemaah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan AS, menjadi faktor peneknat terjadinya konflik terbuka di Natuna. Jikapun terjadi konflik terbuka di Spratly Island, Natuna insya Allah aman. Sebab, rasionalitas ekonomi mengajarkan, mana ada negara yang mau merugi dan mengorbankan investasinya hanya gara-gara konflik yang terjadi di tempat lain.

Strategi *equal distance* dalam pembangunan Natuna di satu sisi dapat menegaskan kehadiran negara. Di sisi lain, menekan konflik terbuka antara gajah-gajah. Dengan mengajak para gajah ikut investasi berjemaah, pelanduk tak kan mati di tengah.

## G20, COP26 and SDGs: Toward Nature 5.0

Indonesia will hold the Group of 20 presidency in 2022 with the theme of "Recover Together, Recover Stronger", which reflects the spirit of collective global recovery needed after the world has struggled to deal with the COVID-19 pandemic since early 2020.

The theme sets out the vision that no one is left behind and, with this collective recovery process, the G20 must be present inclusively to promote and act on the spirit of a sustainable global recovery. Furthermore, the United Nations Climate Change Conference (COP26) in Glasgow recently brought all stakeholders together to accelerate common actions toward the goals of the Paris Agreement and the UN Framework Convention on Climate Change.

As a result of the pandemic, many governments require prompt actions in supporting their country's health and economic resilience, including conducting vaccination, protecting workers and businesses, and empowering the vulnerable through adequate social protection. Thus, an international commitment to ensure adequate financing to contain the pandemic and protect people, exchange clinical data and share medical supplies and vaccines is important for strengthening global health systems.

On the other hand, global soli-



By Mohammed Ali Berawi

Jakarta

Director of the Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID), University of Indonesia

arity on supporting economic resilience is conducted through enhancing fiscal and debt management capacity, fair investment support and social protection to overcome the pandemic crisis.

Science and technology will assist us in tackling the pandemic by producing a suitable strategy for monitoring, treating, mitigating, and recovering from its impact. To anticipate such impact, a comprehensive plan is required for increasing the capacity for disruptions and surges in demand, especially for basic needs such as health and medicine, food, water and energy. The COVID-19 pandemic suggests the need to rethink the role of resilience knowledge and practices in order to ensure the performance of the built environment to meet the health-related criteria.

I propose the concept of Nature 5.0 as a balance between economic interest (Industry 5.0) and creative innovative – adaptive human being (Society 5.0) to regenerate nature. I argue that the concept of regenerating nature enables us to invent the technology as well as increase our quality of life that helps us to sustain the Earth as our living planet (Berawi, 2019). Human intervention with science and

environmentally friendly materials and goods are among the pathways by which technology will significantly contribute to achieving sustainable development targets.

Technology has altered the nature processes, from its creation stage (Nature 1.0), adaptation, evolution, to coalition (Nature 4.0). After the existence of Earth (Nature 1.0), the adaptation stage is the process that makes organisms better suited to their habitat (Nature 2.0). Interactions between organisms produce evolutions of fitness (Nature 3.0), and over hundreds of years later, evolution has caused us to promote and share the Earth's natural resources (Nature 4.0). The advancements in the technology revolution have allowed us to play a significant role in shaping and regenerating nature (Nature 5.0).

The technology development contributes to improving the global environment by producing green, resource-secure and inclusive economies for all. Thus, we need to create and utilize healthier and environmentally friendly technology in our basic needs fulfillment, e.g. food, housing and energy, to create sustainable smart cities and industrial development. The well-being of our future will be subjected to how we produce technology that can govern our climate, health, social equity and stability.

Technology can be used to mitigate and provide a solution for enhancing our quality of life by producing sustainable products and services. For example, by using an advanced information technol-

ogy system, we are creating new ways to reduce transportation emissions and manage resource consumption, in a way that is better for the economy, community and environment.

Furthermore, digital technologies such as the internet of things (IoT), artificial intelligence (AI), data analytics, machine learning, 3D printing, etc., can be utilized to create, expand and monitor the effectiveness of sustainable development goals and environmental compliance across the globe. The technologies can be efficiently used to control and to improve required resources, energy, water and waste by connecting and automatically exchanging information via intra- and inter-systems.

I would like to highlight a need to carefully manage the social, environmental and economic dimensions of this crisis in order to enhance societies' and countries' resilience. The Sustainable Development Goals (SDGs) established actions to end poverty, improve health and education, and promote prosperity and well-being by considering environmental sustainability, which requires value changes, institutional changes and cultural adjustment.

Partnership and collaborative processes from all stakeholders are required to enhance the acceleration and adoption of technologies for environmental regeneration and quality of life

improvement. In this context, policymakers, business practitioners, scientists and smart societies are working together to add sustainable value to reinforce the positive aspects of technology's effect on nature. As technology changes the way we live, it will continue to have a profound impact on the way we regenerate and protect our environmental sustainability.

Responses to COVID-19 have also prompted a strong drive to reduce unequal access to, and the quality of, public education and health facilities supported by government policies in order to increase the country's resilience. Furthermore, this drive will prompt stronger support for small and medium enterprises through business incubators and start-up companies to ensure urban economic resilience. The future development is a model with an emphasis on innovation, inclusivity and sustainability. The world development agenda can be boosted by strengthened knowledge-sharing and collaboration among stakeholders in international contexts.

Therefore, G20 members need to commit to supporting the science and technology process and expanding access across countries members. The G20 needs to strengthen cooperation in order to overcome the pandemic and enhance science and technology contribution toward Nature 5.0.